

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG DI KAMPUNG BENAYAH KECAMATAN
PUSAKO KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Oleh

MIZA FEBRIANI FITRI

Kata kunci: Evaluasi, Tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang ditemukan dalam melakukan observasi langsung kelapangan. Dimana terlihat belum optimalnya tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas LPM. Indikator evaluasi yang digunakan meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketetapan. Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi Penghulu, Ketua LPM Kampung, Anggota LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat (KK) dengan jumlah responden sebanyak 61 orang yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, wawancara, observasi sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui peraturan-peraturan, dokumentasi laporan dan data lain yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berada dalam kategori “Cukup Baik”. Adapun factor penghambat Evaluasi Pelaksanaan Masyarakat Kampung di Kampung Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yaitu dalam segi kurangnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh LPM kepada Ketua RT Menjadikan LPM Kampung di Kampung Benayah kesulitan untuk menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, Dari segi melaksanakan dan mengendalikan pembangunan belum optimalnya pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di kampung Benayah hal ini dikarenakan masih jarang nya pembangunan yang dihasilkan oleh LPM itu sendiri. Kebanyakan pembangunan yang ada di Kampung Benayah berasal dari pemerintah Kampung dan Kabupaten yang diawasi langsung oleh pihak terkait.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION OF
EMPOWERMENT COMMUNITY IN KAMPUNG IN KAMPUNG BENAYAH,
KECAMATAN PUSAKO, KABUPATEN SIAK**

ABSTRACT

MizaFebrianiFitri

Keywords: Evaluation, Task, Community Empowerment Institute

This research is motivated by the phenomenon found in direct observation of spaciousness. Where the task of the Institute for Community Empowerment is not yet optimal. The purpose of this study was to find out the results of the Evaluation of the Task of Community Empowerment Institutions in Benayah Village, Pusako District, Siak Regency and to find out the obstacles in the implementation of LPM tasks. Evaluation indicators used include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and determination. The type of research used is quantitative with the population of Penghulu, Chairperson of LPM Kampong, Member of LPM, Head of Hamlet, Chairperson of RW, Chairperson of RT and Community (KK) with a total of 61 respondents determined by census technique and purposive sampling. Data collection techniques used are primary data collected by questionnaire techniques, interviews, observations while secondary data is collected through regulations, report documentation and other data obtained then analyzed descriptively. Based on the results of the analysis it was concluded that the implementation of the tasks of the Village Community Empowerment Institution in Benayah Village, Pusako District, Siak Regency was in the category of "Good Enough". The inhibiting factors of the Evaluation of the Implementation of the Village Community in Benayah Village, Pusako Subdistrict, Siak Regency are in terms of unoptimal socialization carried out by LPM Kampung Benayah. monitoring of the implementation of the existing construction in the village of Benayah, this is due to the lack of development produced by the LPM itself. most of the development in Benayah village comes from the village and district governments that are supervised directly by the relevant parties